

## ABSTRAK

Mini Setiawati. 2024. Kajian Normatif Putusan Pn Cibinong Nomor 31/Pid.Sus/2023/Pn Cbi Terkait Tindak Pidana Perusahaan Yang Melakukan Pengupahan di Bawah Upah Minimum Provinsi. Skripsi. Program Studi Hukum, FH, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H.,M.H. (II) Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.

Penelitian ini mengkaji terkait tindak pidana pengupahan di bawah upah minimum provinsi, menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer berdasarkan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan bahan bacaan lainnya. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode studi kepustakaan. Teknik analisis data berupa metode silogisme dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana regulasi hukum pidana positif tentang perusahaan yang memberikan upah di bawah upah minimum provinsi sebagai tindak pidana serta sanksi bagi perusahaan atau pengusaha yang memberikan upah di bawah upah minimum provinsi kepada tenaga kerjanya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 185 yaitu terancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

**Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi, Cipta Kerja, Ketenagakerjaan**

## **ABSTRACT**

*Mini Setiawati. 2024. Normative Study of Cibinong District Court Decision Number 31/Pid.Sus/2023/Pn Cbi Regarding the Crime of Companies Paying Below the Provincial Minimum Wage. Thesis. Law Study Program, FH, PGRI Madiun University. Supervisor (I) Dr. Siska Diana Sari, SH, MH (II) Bintang Ulya Kharisma, SH, M.Kn.*

*This research examines the criminal offense of wages below the provincial minimum wage, using normative juridical research methods that refer to legal norms contained in laws and court decisions. The legal materials used are primary legal materials based on court decisions and secondary legal materials obtained from laws and regulations, books, journals, the internet, and other reading materials. The approach used is the statutory approach and case approach. The data collection method used is the literature study method and the data is compiled quantitatively. Data analysis techniques in the form of syllogism and interpretation methods. The results of this study show how positive criminal law views companies that provide wages below the provincial minimum wage as a criminal offense and sanctions for companies or employers who violate it, which are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law article 185, namely threatened with imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 4 (four) years and / or a fine of at least Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 400,000,000.00 (four hundred million rupiah).*

**Keywords: Provincial Minimum Wage, Job Creation, Employment**